

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha dan dioperasikan oleh 1 atau lebih individu dengan sejumlah kekayaan dan pendapatan. Perkembangan UMKM di Indonesia sendiri terbilang sangat pesat. Seperti dikutip dari portal berita OKEzone.com, pelaku UMKM berkontribusi terhadap perekonomian nasional, sehingga di krisis ekonomi di Indonesia di 1998. UMKM menjadi salah satu instrumen penting yang dapat menyelamatkan perekonomian dari keterpurukan akibat krisis keuangan Asia tahun 1997-1998. UMKM umumnya menyumbang 60% pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Jumlah ini dinilai paling tinggi dibandingkan bidang usaha lainnya. Dalam hal penyedia lowongan pekerjaan saat ini, usaha kecil ini dapat menyediakan lebih dari 120 juta pekerjaan. Sebanding dengan jumlah unit UMKM dari berbagai daerah di Indonesia yang mencapai 99,7% (Devany, 2017). Fakta ini sejalan dengan peraturan Menteri Koperasi dan UMKM UU No 5 Tahun 2020 berfokus pada pengembangan UMKM ke depan untuk memperkuat ketahanan ekonomi mendukung pertumbuhan kualitatif dan peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, transformasi, mengimpor dan meningkatkan kesempatan kerja dari penguatan UMKM dan kewirausahaan. Salah satu faktor pendukung peran UMKM dalam perekonomian nasional adalah bonus demografi Indonesia, Dimana jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 2,3%.

Indonesia merupakan negara berkembang, pernyataan ini dikemukakan oleh PBB melalui *Human Development Index* (HDI). Ruslina (2020) berpendapat bahwa sebagai negara berkembang, tentunya tidak terlepas dari upaya untuk

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sebagai perencanaan pembangunan (*development planning*). Upaya pemerintah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tidak terlepas dengan peran masyarakat, salah satunya dengan mengadakan beasiswa dan pelatihan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM. Namun, hal ini tentu saja belum mampu mengurai pengangguran jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja sama besarnya, atau mendirikan usaha sendiri. Ranjan (2019) berpendapat bahwa mendirikan usaha atau berwiraswasta memiliki dampak positif untuk pembangunan ekonomi, hal ini menciptakan lapangan kerja besar hingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dapat melakukan inovasi atau menciptakan produk baru. Dengan adanya upaya untuk melakukan kegiatan berwirausaha, diharapkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dan pendapatan per kapita dapat mengalami peningkatan. Banyaknya usaha yang berdiri, termasuk dengan pertumbuhan UMKM merupakan salah satu indikator meningkatkan ekonomi.

Standar Akuntansi Entitas, Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) diterbitkan untuk mendukung pelaporan keuangan UMKM agar kinerja dan prospeknya lebih jelas serta andal bagi pihak internal dan eksternal, meskipun penerapannya menimbulkan berbagai persepsi terkait efektivitas, efisiensi, kemudahan, dan kegunaannya (Davina & Manurung, 2023). SAK EMKM digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik agar UMKM mampu menyusun laporan keuangan yang informatif sehingga memudahkan investor dalam memberikan pembiayaan.

SAK EMKM meski ringkas dan mudah dijadikan acuan, masih dianggap memberatkan sehingga tingkat kebutuhan dan penerapannya pada UMKM tergolong rendah (Nopangga *et al.*, 2021). Kurangnya pengetahuan dan

kesadaran akuntansi membuat pengusaha kecil mengabaikan pencatatan keuangan, sehingga pengelolaan usaha menjadi tidak terarah dan menghambat perkembangan UMKM. Hal tersebut terjadi karena pengetahuan tentang Standar Akuntansi Keuangan EMKM dan kurangnya sosialisasi atau pelatihan oleh pemerintah (Aini *et al.*, 2025).

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga UMKM masih juga belum optimal, hingga pemahaman tentang pentingnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK EMKM) masih sulit untuk dipahami. Seiring dengan perkembangan UMKM, diperlukan adanya standar akuntansi lebih sederhana dari Standar Akuntansi Umum berbasis IFRS dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM ke UMKM karena keterbatasan tenaga di penyusunan laporan keuangan menggunakan dua pilar Standar akuntansi keuangan tersebut (Malik *et al.*, 2011). Akibatnya, sulit bagi UMKM untuk mengumpulkan bukti transaksi, dan juga sulit bagi UMKM untuk mendapatkan kredit dari luar perusahaan, pemerintah, calon investor dan perbankan. Pemisahan aset usaha dan pribadi sering kali tidak dilakukan oleh pelaku UMKM, sehingga mereka sulit mengetahui secara akurat pendapatan yang diterima, biaya operasional yang dikeluarkan, serta melacak penggunaan bahan baku.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan SAK EMKM disahkan DSAK IAI pada 2016 dan berlaku sejak 1 Januari 2018 sebagai acuan penyusunan laporan keuangan UMKM untuk mendukung perekonomian Indonesia, laporan tersebut berisi informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan (Rorong *et al.*, 2024). Berdasarkan data dari Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2025, total UMKM sebanyak 9,78 juta total unit usaha. Penerbitan SAK EMKM ini mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM dalam proses pencatatan

laporan keuangan. Dengan SAK EMKM UMKM semakin maju, misalnya UKM menyelenggarakan pencatatan laporan keuangan perusahaannya. Mengingat informasi akuntansi memegang peranan penting dalam keberhasilan bisnis, termasuk UMKM.

Laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi posisi, kinerja, dan arus kas entitas untuk pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban manajemen, dengan karakteristik dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. SAK EMKM masih kurang dikenal UMKM akibat minimnya sosialisasi, terbukti dari penelitian Nurlaila (2018) dan (Sari, 2017) yang menunjukkan sebagian besar usaha kecil belum atau belum siap menerapkannya dalam pencatatan keuangan (Sari, 2017).

Laporan keuangan UMKM *Vara OnPoint Print* masih belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pemilik usaha terhadap SAK EMKM yang telah berlaku sejak tahun 2018, serta anggapan bahwa pencatatan keuangan yang sederhana sudah memadai untuk kebutuhan usaha. *Vara OnPoint Print* tidak melakukan pencatatan transaksi secara rinci, baik harian maupun periodik, melainkan hanya memantau saldo akhir rekening tabungan usaha setiap bulan sebagai indikator hasil operasional. Atas dasar kondisi tersebut, peneliti memilih judul “Konstruksi Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Sak Emkm) (Studi Kasus Pada Umkm *Vara Onpoint Print*)” serta menjadikan *Vara OnPoint Print* sebagai lokasi penelitian karena ketersediaan data keuangan dasar, keterbukaan pemilik dalam memberikan informasi, dan karakteristik usahanya yang merepresentasikan kondisi umum UMKM mikro, sehingga relevan untuk

mengkaji potensi penerapan SAK EMKM dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mendukung pengambilan keputusan usaha internal.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya maka masalah dapat dirumuskan sebagai pembatas penelitian agar lebih terfokus. Berikut rumusan masalah yang telah ditemukan:

1. Bagaimana praktek penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pada UMKM *Vara OnPoint Print*?
2. Bagaimana perbandingan penyusunan laporan keuangan UMKM *Vara OnPoint Print* dengan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah berikut:

1. Untuk mengetahui praktek-praktek dalam penggunaan laporan keuangan pada UMKM *Vara OnPoint Print* di Kamal, Bangkalan
2. Untuk mengetahui implementasi penyusunan laporan keuangan di *Vara OnPoint Print* apakah sudah sesuai dengan SAK EMKM dan faktor penghambat yang menyebabkan tidak terlaksananya.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah agar penelitian dapat bermanfaat untuk pembaca secara umum dan perusahaan yang terkait dengan penelitian ini. Manfaat penelitian ini ada dua yakni Manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, berikut penjabarannya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang praktek laporan keuangan pada UMKM sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor penghambat yang menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada peneliti mengenai laporan keuangan pada UMKM sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain serta pengetahuan bagi mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai laporan keuangan pada UMKM sesuai dengan Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).